

Rakor Kementerian ATR/BPN Bersama KPK dan Pemerintah Daerah se-Sultra, Hasilkan Komitmen Pencegahan Korupsi, Peningkatan Ekonomi Daerah dan Fokus Benahi Tata Kelola Pertanahan di Sultra



Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

SULTRA, BP-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah melalui rapat koordinasi yang digelar sebagai tindak lanjut kerja sama lintas lembaga di bidang pertanahan dan tata ruang.

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri ATR/

Lanjut ke Hal: 7

BPS Buton Selatan Perkuat Kualitas Layanan Lewat Forum Diskusi Publik, Komitmen Hadirkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP - Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kegiatan tersebut dipusatkan di Kantor BPS Kabupaten Buton Selatan, Desa Lawela Selatan, Kecamatan, Batauga, Sulawesi Tenggara (Sul-

tra), menghadirkan sejumlah perwakilan instansi pemerintah, akademisi, mahasiswa, media massa, hingga lembaga swadaya masyarakat. Hadir di antaranya perwakilan Bappeda Kabupaten Buton Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan, LPM Kelurahan Laompo, Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton.

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton

Selatan, La Ode Ikhsanuddin Hamid, SST., M.Si mengatakan pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat sehingga kualitas layanan harus terus ditingkatkan agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

“Standar pelayanan bukan hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi juga merupakan bentuk komitmen kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tekankan Disiplin dan Integritas saat Lantik 15 Pj Kepala Desa dan Puluhan ASN Mulai Dari Pimpinan



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, menegaskan pentingnya profesionalitas, integritas, serta pelayanan publik yang optimal saat melantik 15 Penjabat (Pj) Kepala Desa di wilayah Kabupaten Buton Selatan.

Pelantikan 15 Pj Kepala Desa di pusatkan di Gedung Lamaindo di Jalan Gajah Mada Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dalam arahnya, Bupati menyoroti pentingnya menjaga kebersihan desa sebagai salah satu indikator penilaian, terutama ketika menerima kunjungan tamu. Ia juga menekankan peran strategis camat dalam melakukan pengawasan dan membangun sinergi dengan pemerintah

desa.

“Jangan sampai kita lengah. Kebersihan desa harus menjadi perhatian serius. Peran camat harus aktif mengontrol dan membangun kerja sama, karena denyut nadi kehidupan masyarakat ada di desa,” tegasnya, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, Bupati mengingatkan para penjabat kepala desa untuk bekerja secara profesional dan disiplin, serta tidak hanya menjalankan tugas administratif di balik meja. Ia meminta para kepala desa turun langsung ke lapangan untuk memahami kondisi masyarakat secara nyata.

“Tugas utama saudara adalah menjalankan roda pemerintahan desa, mendukung pembangunan, dan mempersiapkan pemilihan kepala desa definitif. Bekerjalah dengan disiplin tinggi, pahami aturan, dan

pastikan semua perangkat desa bekerja sesuai koridor hukum,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan peringatan keras terkait pengelolaan anggaran desa. Ia menegaskan bahwa dana desa merupakan amanah rakyat yang harus digunakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Jangan bermain-main dengan anggaran desa. Saya tidak ingin ada penjabat kepala desa di Buton Selatan yang tersangkut masalah hukum karena penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.

Bupati juga mendorong terciptanya pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan ramah. Ia meminta para kepala desa untuk tidak mempersulit urusan masyarakat, me-

Lanjut ke Hal: 7

SPMB SMPN 1 Batauga Mulai Juni, Sekolah Pastikan Bebas Pungutan, Maksimalkan Dapodik untuk Penerimaan Murid Baru

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - SMP Negeri 1 Batauga, Kabupaten Buton Selatan, menargetkan pembukaan hingga enam rombongan belajar (rombel) dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026. Sekolah tersebut optimistis mampu menampung lebih dari 100 siswa baru seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan menengah pertama di wilayah Batauga dan sekitarnya.

Pelaksanaan penerimaan siswa baru dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026. Seluruh tahapan penerimaan akan dilakukan berdasarkan petunjuk



Kepala SMPN 1 Batauga Wa Ode Saniarti

teknis (juknis) pemerintah dengan menitikberatkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan tanpa pungutan biaya.

Kepala SMPN 1 Batauga Wa Ode Saniarti mengatakan pihak sekolah

telah membentuk panitia resmi melalui surat keputusan sekolah guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

“Penerimaan ini gratis, tidak ada biaya apa

Lanjut ke Hal: 7

Rakor Kementerian ATR/BPN Bersama KPK dan Pemerintah Daerah se-Sultra, Hasilkan Komitmen Pencegahan Korupsi, Peningkatan Ekonomi Daerah dan Fokus Benahi Tata Kelola Pertanahan di Sultra

Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menetapkan transformasi layanan pertanahan sebagai salah satu program strategis kementerian.

“Kegiatan yang kita kerja samakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan inisiasi dari Pak Menteri, beliau juga berkomitmen menetapkan transformasi layanan pertanahan menjadi salah satu program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng pada Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset BMD Wilayah Sultra yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis, (07/05/2026).

Ia menuturkan, Sultra dipilih sebagai salah satu pilot project kerja sama bersama KPK sehingga diharapkan dapat menjadi contoh implementasi program yang berhasil di daerah. Menurutnya, kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan KPK yang diluncurkan sejak Oktober 2025 bertujuan

memberikan manfaat nyata bagi daerah, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, hingga peningkatan kualitas layanan publik di bidang pertanahan.

Disaksikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto dan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, para pihak menyepakati komitmen bersama, di antaranya meningkatkan sinergi dan kolaborasi di bidang pertanahan dan tata ruang, mendorong implementasi sembilan paket program kerja sama, memperkuat koordinasi antarinstitusi secara transparan, menindaklanjuti deklarasi dalam bentuk aksi nyata, serta menjalankan tugas sesuai peran dan fungsi masing-masing.

“Dari komitmen ini saya harapkan Bapak Ibu setelah kita bagikan ini bisa menjaga komitmen bersama ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk pencegahan korupsi

dan peningkatan ekonomi daerah,” tegas Andi Tenri Abeng.

Sebagai informasi, sembilan program kerja sama untuk mendukung komitmen tersebut, di antaranya, integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), serta sensus pertanahan berbasis geospasial.

Fokus berikutnya ditekankan terkait integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menilai sektor pertanahan dan pengelolaan barang milik daerah

merupakan bidang yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, menurutnya, kedua sektor tersebut masih menghadapi berbagai persoalan kompleks.

Karena itu, Gubernur Sultra mengapresiasi pelaksanaan rakor yang dinilai dapat mendorong peningkatan kualitas layanan pertanahan sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat. “Semoga kita semua dapat terus memperkuat komitmen bersama, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Serta dapat menghadirkan pelayanan publik yang terbaik pada seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.

Adapun Rakor kali ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra, Budi Hartanto; Bupati dan Wali Kota se-Sultra; serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Sultra. (*)

SPMB SMPN 1 Batauga Mulai Juni, Sekolah Pastikan Bebas Pungutan, Maksimalkan Dapodik untuk Penerimaan Murid Baru

pun. Selama calon siswa memenuhi persyaratan, kami terbuka menerima sesuai ketentuan yang ada,” ujar Wa Ode Saniarti saat ditemui di SMPN 1 Batauga, Selasa (6/5/2026).

Menurut dia, target pembukaan lima hingga enam rombel disesuaikan dengan kapasitas sekolah dan ketentuan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Setiap rombel dirancang menampung maksimal 32 siswa.

Dengan kapasitas tersebut, sekolah berpotensi menerima hingga 192 peserta didik baru apabila seluruh rombel terpenuhi. Namun, jumlah rombel tetap bergantung pada jumlah pendaftar yang masuk selama masa penerimaan berlangsung.

“Kalau terpenuhi lima rombel, berarti bisa menampung lebih dari 100 siswa. Kami sudah menjalin komunikasi dengan SD-SD terdekat untuk mendukung capaian tersebut,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, SMPN 1 Batauga menerapkan beberapa jalur penerimaan, yakni jalur zonasi berdasarkan domisili, jalur prestasi akademik maupun non-akademik, serta jalur perpindahan tugas orang tua yang dibuktikan dengan dokumen resmi.

Sekolah juga mulai menyiapkan sejumlah perangkat administrasi pendukung, seperti pemasangan spanduk informasi penerimaan siswa baru, kesiapan operator Dapodik,

hingga sistem verifikasi dokumen calon peserta didik.

Setiap berkas pendaftaran yang diterima akan langsung diverifikasi dan diinput ke dalam sistem Dapodik. Verifikasi meliputi pemeriksaan usia calon siswa, dokumen kelulusan, hingga pengukuran tinggi dan berat badan sesuai ketentuan juknis.

“Setelah berkas diterima, langsung kami input ke Dapodik. Kami juga melakukan verifikasi seperti pengukuran tinggi dan berat badan, usia calon siswa sesuai juknis, serta kelengkapan dokumen seperti ijazah atau surat keterangan lulus,” jelasnya.

Secara nasional, sistem penerimaan peserta didik di Indonesia terus mengalami perubahan sejak diberlakukannya kebijakan zonasi pada 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memperluas akses pendidikan yang lebih merata dan mengurangi ketimpangan kualitas antarwilayah.

Pada 2024, pemerintah mulai memperkenalkan istilah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai penyempurnaan dari sistem sebelumnya yang dikenal sebagai PPDB. Perubahan tersebut bertujuan memperkuat transparansi, digitalisasi data pendidikan, dan pemerataan akses layanan pendidikan dasar serta menengah.

Secara internasional, sejumlah nega-

ra juga menerapkan sistem penerimaan berbasis wilayah dan kapasitas sekolah. Jepang dan Korea Selatan, misalnya, menggunakan pendekatan zonasi pendidikan untuk memastikan distribusi siswa lebih seimbang dan mengurangi penumpukan peserta didik di sekolah tertentu.

Sementara itu, Finlandia yang dikenal memiliki sistem pendidikan terbaik dunia, menempatkan prinsip pemerataan akses pendidikan sebagai fondasi utama pelayanan publik di sektor pendidikan. Sistem tersebut menekankan kualitas sekolah yang relatif setara di setiap wilayah sehingga masyarakat tidak terpusat pada sekolah tertentu saja.

Wa Ode Saniarti berharap jumlah pendaftar tahun ini dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Menurut dia, meningkatnya jumlah siswa baru akan menjadi indikator tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di SMPN 1 Batauga.

“Kami berharap minat masyarakat terus meningkat dan SMPN 1 Batauga tetap menjadi pilihan utama bagi lulusan SD di wilayah ini,” tutupnya.

Upaya memperkuat kualitas layanan pendidikan tersebut juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah tingkat menengah pertama, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terluar Indonesia. (*)

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tekankan Disiplin dan Integritas saat Lantik 15 Pj Kepala Desa dan Puluhan ASN Mulai Dari Pimpinan Tinggi Pratama, Hingga Pejabat Struktural, Berikut Nama-namanya

lainkan menjadi solusi bagi kebutuhan warga.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kepemimpinan berbasis kemanusiaan. Para kepala desa diminta aktif memantau kondisi masyarakat, termasuk memastikan tidak ada warga yang tinggal di rumah tidak layak huni tanpa perhatian pemerintah.

“Kalau ada warga yang rumahnya tidak layak, segera koordinasikan dengan camat agar bisa mendapatkan bantuan, seperti program bedah rumah. Ini bukan hanya tugas, tetapi juga nilai ibadah bagi kita semua,” ungkapnya.

Bupati juga mengajak seluruh jajaran pemerintah desa untuk solid dan kompak dalam membangun Buton Selatan ke arah yang lebih baik.

“Perjuangan kita belum berakhir. Saya minta dukungan

penuh agar Buton Selatan ke depan bisa menjadi daerah yang lebih maju,” tambahnya.

Adapun 15 pejabat kepala desa yang dilantik di Kabupaten Buton Selatan, yakni:

1. La Ode Mastatar Mas'ud (Molona)
2. La Baharuddin (Mokobeau)
3. La Mbiga (Watuampara)
4. La Sayedi (Bahari Tiga)
5. Boys Santriawan Enti (Lontoi)
6. Ruslan Gande (Gaya Baru)
7. Ridha Fitri Albariu (Tolando Jaya)
8. Sabaria (Kamoali)
9. Imanuddin (Windu Makmur)
10. Wa Ode Muslimat Baidun Hazan (Banabungi Selatan)
11. Nur Wahyuli Kaman (Lapara)
12. Mulyani Duma (Bahari Dua)
13. Kasyafan (Waindawula)

14. Ali Zubaeda (Kaofe)

15. La Ode Ali Tasri (Batutas Timur)

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pemerintahan desa serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga melakukan penataan besar-besaran terhadap struktur birokrasi melalui pelantikan dan mutasi aparatur sipil negara (ASN), Selasa, 5 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mengisi kekosongan jabatan,

Pelantikan yang dipimpin langsung Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, mencakup

pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat struktural.

Penataan jabatan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 1569 Tahun 2026 tertanggal 5 Mei 2026. Puluhan ASN ditempatkan pada posisi baru di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) setelah tahapan uji kompetensi dan memperoleh pertimangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.

Untuk nama-nama ASN yang dilantik jadi administrator, jabatan pimpinan tinggi pratama bisa dibaca di www.baubaupost.com dengan judul yang sama. (*)

BPS Buton Selatan Perkuat Kualitas Layanan Lewat Forum Diskusi Publik, Komitmen Hadirkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

da masyarakat,” ujar La Ode Ikhsanuddin Hamid saat membuka kegiatan FGD, Kamis, (7/5/2026).

Ia menjelaskan, evaluasi terhadap pelayanan publik menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas layanan. Salah satu instrumen yang digunakan yakni Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sekaligus mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki.

Menurutnya, pada tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan mencapai angka 94,47 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya se-

besar 90,92. Selain itu, BPS Buton Selatan juga memperoleh predikat A- dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025.

La Ode Ikhsanuddin menegaskan hasil SKM tidak boleh hanya menjadi laporan administratif, tetapi harus menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

“Penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan perlu selaras dengan masukan, harapan, serta pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan,” katanya.

Melalui FGD tersebut, ia berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan kon-

struktif guna menyempurnakan standar pelayanan agar lebih relevan, implementatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat budaya pelayanan prima di lingkungan kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan sehingga pelayanan yang diberikan semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

FGD Standar Pelayanan Publik tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala BPS Kabupaten Buton Selatan dengan harapan menghasilkan rumusan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. (*)

Bakom RI Rangkul Media Digital untuk Perluas Informasi Pemerintah



Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari.

Laporan: Alwan

JAKARTA -- Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mulai memperkuat kolaborasi dengan sejumlah media digital yang tergabung dalam New Media Forum sebagai langkah memperluas komunikasi publik di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat Indonesia.

Kebijakan tersebut diumumkan Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/5). Pemerintah menilai media digital kini telah menjadi bagian penting dalam ekosistem penyebaran informasi nasional seiring meningkatnya penggunaan platform digital dan media sosial di berbagai lapisan masyarakat.

Menurut Qodari, pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan media arus utama untuk menjangkau publik, tetapi juga memanfaatkan kekuatan media baru yang memiliki basis pengikut besar dan pengaruh luas di ruang digital.

"Kehadiran teman-teman New Media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga melalui kanal digital yang sudah menjadi realita komunikasi masyarakat hari ini," kata Qodari.

New Media Forum diketahui menjadi wadah berhimpunnya sejumlah pelaku media digital yang sebelumnya populer dengan istilah *homeless media*. Istilah itu merujuk pada media berbasis platform digital yang

tumbuh di media sosial tanpa memiliki format media konvensional seperti televisi, radio, atau surat kabar.

Beberapa platform yang tergabung dalam forum tersebut antara lain Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusikgram, Infipop, USS Feeds, Bapak-bapak ID, Menjadi Manusia, GNFI, Creativox, Kok Bisa, hingga CXO Media.

Selain itu, terdapat pula platform seperti Goodstats, Big Alpha, Volix, Ngomongin Uang, Pandemictalks, Proud Project, Hai Dudu, Taubatters, Kawan Hawa, Mature Indonesia, Mahasiswa dan Jakarta, serta Melodi Alam.

Bakom RI mencatat media-media tersebut memiliki kekuatan jangkauan yang sangat besar. Jumlah pengikut gabungan platform yang tergabung dalam New Media Forum diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta akun dengan total tayangan bulanan mencapai miliaran views.

"Dengan realita bahwa New Media sudah punya followers yang sangat besar dan views mencapai miliaran setiap bulan, kami menilai pendekatan terbaik adalah melakukan engagement agar kualitas New Media semakin meningkat," ujar Qodari.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam perkembangan media digital, terutama terkait penerapan prinsip jurnalistik seperti keberimbangan informasi atau *cover both side*.

Qodari menyebut praktik verifikasi informasi di sebagian media digital masih

perlu diperkuat agar kualitas produk informasi yang beredar di ruang publik tetap terjaga dan tidak memicu disinformasi.

"Pandangan kami, New Media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar sehingga produk yang dihasilkan semakin berkualitas seperti media konvensional," katanya.

Ia juga menilai dialog dan silaturahmi dengan pelaku media digital menjadi langkah penting agar pemerintah dapat menyampaikan berbagai masukan terkait etika, standar informasi, dan tanggung jawab publik.

"Kalau silaturahmi, poin-poin masukan dan saran itu bisa tersampaikan dengan baik," tutur Qodari.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan media digital di Indonesia memang berlangsung sangat pesat. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan jumlah pengguna internet nasional pada 2025 telah melampaui 220 juta orang atau lebih dari 79 persen populasi Indonesia. Kondisi itu mendorong pergeseran pola konsumsi informasi dari media konvensional menuju platform digital berbasis media sosial.

Fenomena serupa juga terjadi secara global. Laporan Reuters Institute Digital News Report dalam beberapa tahun terakhir mencatat generasi muda di berbagai negara mulai meninggalkan media tradisional dan lebih banyak memperoleh informasi melalui media sosial, video pendek, pod-

cast, hingga platform kreator digital.

Di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, pemerintah serta institusi media arus utama juga mulai menggendeng kreator konten digital untuk menjangkau kelompok usia muda yang semakin jarang mengakses televisi maupun surat kabar cetak.

Indonesia sendiri pernah mengalami momentum besar perubahan lanskap media saat ledakan penggunaan media sosial pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Pada periode tersebut, platform digital menjadi sarana utama penyebaran informasi politik, kampanye publik, hingga pembentukan opini masyarakat.

Namun, perkembangan tersebut juga diiringi meningkatnya penyebaran hoaks dan disinformasi. Karena itu, pemerintah menilai penguatan kolaborasi dengan media digital perlu dilakukan bersamaan dengan peningkatan kualitas verifikasi dan tanggung jawab jurnalistik.

Qodari menambahkan sebagian unsur kelembagaan media digital saat ini mulai terbentuk secara lebih profesional, mulai dari badan usaha, struktur redaksi, hingga alamat perusahaan yang jelas. Hal itu dinilai membedakan New Media dengan akun anonim di media sosial yang tidak memiliki tanggung jawab kelembagaan.

Melalui kolaborasi tersebut, Bakom RI berharap media digital tidak hanya menjadi sarana hiburan dan viralitas, tetapi juga mampu berperan sebagai kanal edukasi publik dan penyebaran informasi yang kredibel di tengah derasnya arus komunikasi digital global. (*)

DPR Desak Pengawasan Ketat Bandara dan Pelabuhan Cegah Hantavirus



Hantavirus Ancam Dunia, DPR Minta RI Perkuat Pintu Masuk Negara Pemerintah RI Diminta Tingkatkan Skrining Hantavirus di Seluruh Perbatasan

JAKARTA -- Pemerintah diminta meningkatkan pengawasan di seluruh pintu masuk Indonesia menyusul munculnya kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia. DPR menilai langkah antisipasi harus segera dilakukan untuk mencegah potensi masuknya virus berbahaya tersebut ke wilayah Indonesia melalui jalur internasional.

Wakil Ketua Komisi DPR bidang kesehatan, Yahya Zaini, mengatakan pengawasan harus difokuskan di pelabuhan, bandar udara, serta pos lintas batas negara (PLBN) yang menjadi titik utama mobilitas penumpang dan barang dari luar negeri.

"Saya minta pemerintah mulai memperkuat pintu-pintu masuk ke wilayah Indonesia. Seperti pelabuhan, bandara dan pos lintas batas negara (PLBN)," ujar Yahya saat dihubungi, Jumat (8/5).

Menurut Yahya, pemerintah perlu belajar dari berbagai wabah internasional yang sebelumnya masuk melalui lalu lintas manusia dan barang lintas negara. Pengalaman pandemi Covid-19 pada awal 2020, kata dia, menjadi pelajaran penting bahwa deteksi dini harus dilakukan sebelum penyebaran meluas.

Ia menjelaskan, hantavirus merupakan penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyerang sistem pernapasan dan menimbulkan komplikasi serius. Virus tersebut umumnya ditularkan melalui paparan urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat seperti tikus.

Karena itu, selain melakukan skrining terhadap penumpang internasional, pemerintah juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan tikus di kapal, pelabuhan, gudang logistik, maupun kawasan perbatasan.

"Di mana petugas kesehatan mengambil sampel tikus secara berkala untuk kemudian dilakukan PCR hantavirus sehingga dapat

memastikan ada atau tidaknya virus," kata Yahya.

Ia menambahkan, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan juga perlu diperkuat untuk mendukung proses deteksi dini. Pemeriksaan laboratorium, termasuk tes PCR, dinilai penting agar potensi penyebaran virus dapat segera diketahui apabila ditemukan kasus mencurigakan.

Kekhawatiran terhadap hantavirus muncul setelah World Health Organization mengonfirmasi lima orang terinfeksi virus tersebut di kapal pesiar MV Hondius. Dari jumlah itu, tiga orang dilaporkan meninggal dunia sehingga memicu perhatian banyak negara terhadap potensi penyebaran lintas wilayah.

Kasus di kapal pesiar itu mengingatkan dunia pada sejumlah wabah internasional sebelumnya yang berawal dari lingkungan tertutup transportasi laut. Pada awal pandemi Covid-19, kapal pesiar Diamond Princess sempat menjadi sorotan dunia setelah ratusan penumpang terpapar virus corona saat berlabuh di Jepang.

Secara historis, hantavirus bukan penyakit baru. Virus ini pertama kali mendapat perhatian luas saat terjadi wabah Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) di wilayah Four Corners, Amerika Serikat, pada 1993. Wabah tersebut menyebabkan puluhan korban jiwa dan mendorong penelitian global mengenai penyebaran virus dari hewan pengerat kepada manusia.

Di kawasan Asia, kasus hantavirus juga pernah ditemukan di sejumlah negara seperti China dan Korea Selatan. Bahkan, istilah hantavirus berasal dari Sungai Hantan di Korea, lokasi pertama virus tersebut diidentifikasi saat Perang Korea pada awal 1950-an.

Di Indonesia sendiri, kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia sebenarnya telah meningkat dalam

beberapa tahun terakhir. Pemerintah sebelumnya juga memperkuat pengawasan terhadap flu burung, rabies, hingga Covid-19 sebagai bagian dari sistem mitigasi wabah nasional.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan pemerintah telah melakukan koordinasi dengan WHO untuk memperoleh panduan teknis mengenai langkah skrining dan penanganan dini terhadap potensi penyebaran hantavirus.

"Virus ini, kan, lumayan virus yang berbahaya, jadi kita sudah koordinasi dengan WHO, kita minta guidance untuk bisa melakukan skriningnya," ujar Budi seperti dikutip dari detikhealth, Kamis (7/5).

Menurut Budi, hasil koordinasi sementara menunjukkan penyebaran virus masih terkonsentrasi di kapal pesiar tersebut dan belum ditemukan indikasi penyebaran luas ke negara lain. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi kemungkinan penularan lintas negara.

Pengamat kesehatan masyarakat menilai langkah pencegahan di pintu masuk negara sangat penting dilakukan, terutama karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lalu lintas pelayaran dan penerbangan internasional yang cukup padat.

Selain pengawasan medis, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat juga dinilai menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.

Dengan meningkatnya perhatian dunia terhadap kasus hantavirus, pemerintah diharapkan mampu memperkuat sistem surveilans kesehatan nasional agar Indonesia dapat lebih siap menghadapi ancaman penyakit menular global di masa mendatang. (*)

Andi Sumangerukka Tekankan Pembangunan Terintegrasi di Musrenbang Sultra 2026



Laporan: Mashuri

KOLAKA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai memfokuskan arah pembangunan tahun 2027 pada penguatan kolaborasi lintas pemerintahan, pemerataan pembangunan wilayah, serta efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Langkah tersebut ditegaskan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kolaka, Selasa (5/5/2026).

Di tengah tantangan fiskal daerah dan dinamika ekonomi global, Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 persen pada 2025. Angka itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen dan meningkat dari capaian Sultra pada 2024 yang berada di level 5,40 persen.

Meski pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan rumah besar terkait pengentasan kemiskinan. Tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara pada 2025 tercatat sebesar 10,14 persen atau masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 8,26 persen.

"Pembangunan tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri. Semua harus terhubung, mulai dari pusat, provin-

si, sampai kabupaten dan kota agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Andi Sumangerukka dalam sambutannya.

Menurut gubernur, pendekatan pembangunan yang bersifat sektoral selama ini dinilai kurang efektif dalam mengatasi kesenjangan wilayah maupun ketimpangan ekonomi masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai mendorong model pembangunan terintegrasi berbasis kolaborasi.

Ia menilai penguatan sinergi antarlembaga menjadi kebutuhan mendesak, terutama menghadapi tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia, tekanan geopolitik internasional, hingga ketidakpastian harga komoditas tambang dan energi yang turut memengaruhi daerah penghasil sumber daya alam seperti Sulawesi Tenggara.

"Kolaborasi adalah kunci utama. Kalau pemerintah berjalan bersama, maka pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata," ujarnya.

Dalam forum Musrenbang tersebut, gubernur juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan yang masih menjadi persoalan klasik di Sulawesi Tenggara.

Wilayah kepulauan akan diprioritaskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses transportasi laut,

serta penguatan konektivitas antarpulau. Sementara itu, wilayah daratan diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah daerah turut mendorong penguatan program Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal. Skema tersebut diharapkan mampu mempertemukan pelaku UMKM dengan kawasan industri dan pasar yang lebih luas.

Sejumlah indikator makro pembangunan Sulawesi Tenggara juga menunjukkan perkembangan positif. Gini Ratio pada September 2025 tercatat sebesar 0,357 atau membaik dibanding Maret 2025 sebesar 0,363. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 berada di angka 3,33 persen dan termasuk salah satu yang terendah secara nasional.

Di sektor kualitas sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara tahun 2025 mencapai 74,25 dengan kategori tinggi. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 73,62.

Secara historis, arah pembangunan berbasis kolaborasi sebenarnya telah menjadi pendekatan nasional sejak era reformasi melalui penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir

juga terus mendorong sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Di tingkat internasional, pendekatan pembangunan kolaboratif juga diterapkan di berbagai negara berkembang dalam mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diinisiasi United Nations. Salah satu fokus utamanya adalah mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat pembangunan inklusif.

Andi Sumangerukka mengakui bahwa tantangan fiskal daerah ke depan tidak ringan. Ketergantungan terhadap transfer dana pusat masih cukup tinggi, sementara belanja operasional dan biaya pemeliharaan aset daerah terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Kita harus memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Belanja pemerintah harus produktif dan memperkuat pelayanan publik," katanya.

Forum Musrenbang Provinsi Sulawesi Tenggara 2027 di Kolaka itu dihadiri unsur pemerintah kabupaten dan kota, DPRD, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga perwakilan pemerintah pusat. Hasil forum tersebut akan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan pembangunan Sulawesi Tenggara tahun 2027. (*)

Pemprov Sultra Siaga Tangani Banjir Kali Wanggu, 112 Warga Terdampak di Kendari



Laporan: Lisna

SULTRA BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bergerak cepat menangani dampak banjir yang merendam kawasan Kali Wanggu di Kelurahan Lepo Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dengan fokus utama pada keselamatan warga, pelayanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Hingga Sabtu malam, 9 Mei 2026, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Sultra, Muhammad Fadlansyah, turun langsung ke lokasi banjir untuk memastikan proses penanganan berjalan optimal. Ia terlihat mendampingi petugas gabungan yang masih melakukan pemantauan dan pelayanan kepada warga.

Pemerintah daerah mengerahkan sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Sultra. Langkah tersebut dilakukan segera setelah laporan banjir diterima dari wilayah terdampak di sekitar aliran Kali Wanggu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Andi Syahrir, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi di lapangan guna memastikan masyarakat memperoleh bantuan secara cepat dan tepat.

"Begitu menerima laporan kejadian banjir, instansi teknis langsung bergerak melakukan penanga-

nan darurat di lokasi terdampak," ujar Andi Syahrir.

Berdasarkan data sementara Dinas Sosial Sultra, banjir berdampak pada wilayah RT 03, RT 09, dan RT 12 di Kelurahan Lepo Lepo. Sedikitnya 42 kepala keluarga atau 112 jiwa tercatat terdampak akibat meluapnya air di kawasan tersebut.

Selain mengganggu aktivitas warga, banjir juga menyebabkan 35 rumah terendam air dengan ketinggian bervariasi. Sejumlah warga memilih bertahan di rumah, sementara sebagian lainnya menunggangi ke lokasi aman yang telah disiapkan pemerintah.

Untuk mendukung penanganan darurat, Dinas Sosial Sultra mendirikan tenda penunggsian dan dapur umum lapangan. Fasilitas itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik dan konsumsi masyarakat selama masa tanggap darurat berlangsung.

"Dapur umum sudah beroperasi untuk membantu kebutuhan makanan warga terdampak," kata Andi Syahrir.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Sultra mengerahkan ambulans beserta tenaga medis ke lokasi banjir. Petugas kesehatan disiagakan untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan serta mengantisipasi munculnya penyakit pascabanjir seperti diare, infeksi kulit, dan demam berdarah.

BPBD Sultra juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kota dan aparat setempat guna mempercepat penanganan serta memastikan kondisi masyarakat

tetap aman. Proses pendataan korban dan kerusakan masih terus dilakukan hingga situasi benar-benar kondusif.

"Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan bencana ini," ujar Andi Syahrir menegaskan.

Secara historis, kawasan sekitar Kali Wanggu memang rawan banjir di Kota Kendari. Dalam beberapa tahun terakhir, luapan sungai kerap terjadi saat intensitas hujan meningkat, terutama akibat berkurangnya daerah resapan air dan sedimentasi sungai.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya juga mencatat bahwa banjir menjadi bencana hidrometeorologi paling dominan di Indonesia. Fenomena tersebut meningkat dalam satu dekade terakhir seiring perubahan iklim global yang memicu cuaca ekstrem di berbagai wilayah.

Secara internasional, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menyebutkan bahwa peningkatan curah hujan ekstrem akibat pemanasan global telah menyebabkan frekuensi banjir meningkat di sejumlah negara Asia Pasifik. Indonesia termasuk negara yang rentan menghadapi dampak perubahan iklim karena memiliki banyak wilayah pesisir dan daerah aliran sungai padat penduduk.

Pemerintah Provinsi Sultra berharap kondisi cuaca segera membaik agar proses pemulihan lingkungan dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung lebih cepat. Warga juga diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan susulan yang dapat memicu kenaikan debit air di kawasan Kali Wanggu. (*)

Hardiknas 2026 di Buton Teguhkan Komitmen Pendidikan Berkualitas



Pewarta: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton meneguhkan komitmennya dalam membangun pendidikan berkualitas melalui upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Upacara Perkantoran Takawa, Senin (4/5/2026). Momentum tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, siswa, dan masyarakat dalam menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.

Upacara berlangsung khidmat dan sederhana dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guru, serta pelajar mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kehadiran berbagai unsur pendidikan itu mencerminkan semangat kolektif dalam mendukung pembangunan pendidikan di Kabupaten Buton.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Drs. Awaluddin, memimpin jalannya kegiatan sekaligus membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia mewakili Bupati Buton.

Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional bukan hanya agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi

untuk memperkuat arah pendidikan nasional di tengah tantangan zaman yang terus berkembang.

“Peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan, dan menghidupkan spirit pendidikan nasional,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam sambutan yang dibacakan Inspektur Upacara.

Pemerintah pusat, lanjut sambutan tersebut, menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Pendidikan tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan tanggung jawab sosial peserta didik.

“Pada hakikatnya pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus dan penuh kasih sayang untuk memanusiakan manusia,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam konteks nasional, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap 2 Mei sebagai penghormatan terhadap tokoh pelopor pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Penetapan tanggal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 yang menjadikan momentum Hardiknas sebagai pengingat pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa.

Secara historis, Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sejak awal kemerdekaan. Data

Kementerian Pendidikan menunjukkan angka partisipasi sekolah terus meningkat dalam dua dekade terakhir, seiring perluasan akses pendidikan hingga wilayah terpencil serta peningkatan program bantuan pendidikan nasional.

Di tingkat global, perhatian terhadap pendidikan juga menjadi agenda utama dunia melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan United Nations. Pada Tujuan Keempat SDGs, seluruh negara didorong menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata bagi semua kalangan hingga tahun 2030.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun terus menjalankan sejumlah kebijakan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Program pembelajaran mendalam atau deep learning, penguatan kompetensi guru, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta pendidikan karakter menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah.

“Pendidikan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membangun karakter generasi yang unggul,” demikian kutipan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas akses pendidikan inklusif agar seluruh anak Indonesia memperoleh hak pendidikan yang sama tanpa meman-

dang latar belakang sosial maupun geografis.

Di Kabupaten Buton, semangat tersebut tercermin dari antusiasme peserta upacara yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh rasa nasionalisme. Para guru dan siswa tampak mengenakan seragam resmi serta mengikuti prosesi upacara dengan penuh penghormatan.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Drs. Awaluddin, menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah daerah. Menurut dia, masyarakat di wilayah kepulauan dan kecamatan terpencil harus memperoleh pelayanan kesehatan yang sama dengan masyarakat di wilayah perkotaan.

“Pelayanan kesehatan tidak boleh hanya terpusat di ibu kota daerah. Semua masyarakat harus mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis secara layak,” ujar Azhari di hadapan tenaga medis dan masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut.

Kegiatan bakti sosial tersebut menyediakan sejumlah layanan kesehatan gratis, antara lain khitanan massal, pemeriksaan dokter bedah, pelayanan dokter penyakit dalam, dokter kandungan atau OBGYN, dokter anak, hingga cek kesehatan gratis bagi masyarakat umum. Warga tampak memadati lokasi kegiatan sejak pagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Menurut Azhari, langkah deteksi dini sangat penting dilakukan agar penyakit dapat diketahui lebih

Bakti Sosial di Mawasangka Jadi Langkah Deteksi Dini Penyakit Warga Di Buton Tengah



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terus memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui kegiatan bakti sosial pelayanan kesehatan gratis yang dipusatkan di Gedung Kesenian Kecamatan Mawasangka, Senin (4/5/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai layanan medis mulai dari pemeriksaan kesehatan umum hingga pelayanan dokter spesialis sebagai bagian dari upaya memperkuat deteksi dini penyakit di daerah.

Bupati Buton Tengah, Azhari, yang hadir langsung dalam kegiatan itu menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah daerah. Menurut dia, masyarakat di wilayah kepulauan dan kecamatan terpencil harus memperoleh pelayanan kesehatan yang sama dengan masyarakat di wilayah perkotaan.

“Pelayanan kesehatan tidak boleh hanya terpusat di ibu kota daerah. Semua masyarakat harus mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis secara layak,” ujar Azhari di hadapan tenaga medis dan masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut.

Kegiatan bakti sosial tersebut menyediakan sejumlah layanan kesehatan gratis, antara lain khitanan massal, pemeriksaan dokter bedah, pelayanan dokter penyakit dalam, dokter kandungan atau OBGYN, dokter anak, hingga cek kesehatan gratis bagi masyarakat umum. Warga tampak memadati lokasi kegiatan sejak pagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Menurut Azhari, langkah deteksi dini sangat penting dilakukan agar penyakit dapat diketahui lebih

cepat sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan data kesehatan masyarakat sebagai dasar dalam menentukan langkah mitigasi dan penanganan yang tepat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, saya mengapresiasi seluruh tenaga kesehatan yang terus menghadirkan inovasi pelayanan bagi masyarakat. Kegiatan seperti ini harus dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.

Dorongan terhadap penguatan layanan kesehatan daerah sejalan dengan kebijakan nasional pemerintah dalam memperluas cakupan layanan kesehatan primer. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat terus menggalakkan program transformasi kesehatan yang menitikberatkan pada pencegahan penyakit, pemeriksaan berkala, serta penguatan fasilitas layanan dasar hingga tingkat desa.

Secara historis, Indonesia juga pernah menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari wabah malaria, tuberkulosis, hingga pandemi Covid-19 yang mendorong pemerintah memperkuat sistem kesehatan nasional. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pendekatan promotif dan preventif kini menjadi fokus utama pembangunan kesehatan untuk menekan angka penyakit kronis di masyarakat.

Di tingkat internasional, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sejak lama menekankan pentingnya pelayanan kesehatan primer melalui deklarasi Alma-Ata tahun 1978 yang menjadi tonggak pemerataan akses kesehatan global. Konsep tersebut mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memastikan layanan kesehatan dasar dapat diakses masyarakat hingga wilayah terpencil.

Azhari menambahkan, Pemerintah Ka-

bupaten Buton Tengah akan berupaya memperluas pelaksanaan kegiatan serupa ke seluruh kecamatan, termasuk Kecamatan Talaga Raya. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan masyarakat kepulauan tidak mengalami kesenjangan layanan kesehatan.

“Mari kita manfaatkan pelayanan yang telah tersedia hari ini. Semoga masyarakat selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari berbagai penyakit,” ucapnya.

Pelaksanaan bakti sosial tersebut turut melibatkan berbagai unsur lintas sektor. Hadir dalam kegiatan itu Danyon TP 870 Sangia Wambulu Letkol Inf. Andi Gumilang, Sekretaris Dinas Kesehatan Buton Tengah Hasrun Hasan, SKM, M.Kes, Direktur RSUD Buton Tengah dr. Soraya Wildhani Jamil, Sp.PD, serta Camat Mawasangka Imadudin, S.Pd.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Yonif 870 Sangia Wambulu, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kekuatan penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan daerah.

Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam kegiatan tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pemerintah daerah berharap kegiatan pelayanan kesehatan gratis dapat menjadi agenda rutin yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, dan unsur TNI, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah optimistis kualitas kesehatan masyarakat akan terus meningkat. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif di daerah. (*)

BPOM Temukan 11 Kosmetik Berbahaya Beredar di Indonesia

Peliput: Andina L

JAKARTA, BP- Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 11 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan bahan dilarang selama pengawasan triwulan pertama 2026. Temuan tersebut memicu langkah tegas berupa pencabutan izin edar, penghentian distribusi, hingga penelusuran rantai produksi di berbagai daerah.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan seluruh produk tersebut telah melalui pengujian laboratorium dan dinyatakan tidak memenuhi standar keamanan kosmetik yang berlaku di Indonesia.

"Produk kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Tidak ada toleransi bagi penggunaan bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat," ujar Taruna Ikrar dalam keterangannya di Jakarta.

Dari total temuan tersebut, empat merek diketahui merupakan kosmetik hasil kontrak produksi, dua merek kosmetik lokal, dua merek kosmetik impor, serta tiga merek kosmetik tanpa izin edar (TIE). Seluruhnya ditemukan melalui pengawasan rutin BPOM terhadap produk yang beredar di pasaran selama Januari hingga Maret 2026.

BPOM menemukan sejumlah zat berbahaya dalam produk-produk itu, antara lain asam retinoat, deksametason, hidrokinon, merkuri, pewarna merah K10, serta senyawa 1,4-dioksan. Kandungan tersebut dilarang atau dibatasi penggunaannya karena berisiko serius terhadap kesehatan manusia.

Menurut BPOM, asam retinoat dapat memicu iritasi kulit dan bersifat teratogenik yang berbahaya bagi janin. Deksametason yang tergolong steroid berpotensi menyebab-



kan dermatitis, jerawat parah, hingga gangguan hormonal jika digunakan tanpa pengawasan medis.

Sementara itu, hidrokinon dan merkuri diketahui dapat menyebabkan perubahan warna kulit permanen, iritasi berat, serta kerusakan organ tubuh seperti ginjal. Adapun senyawa 1,4-dioksan dan pewarna merah K10 disebut memiliki potensi karsinogenik atau memicu kanker.

"Temuan ini menunjukkan masih adanya pelaku usaha yang mengabaikan keselamatan konsumen demi keuntungan ekonomi. BPOM tidak akan ragu mengambil tindakan administratif maupun pidana," kata Taruna Ikrar.

Sebagai tindak lanjut, BPOM telah memerintahkan penghentian sementara kegiatan (PSK) terhadap produk terkait, termasuk penghentian produksi, distribusi, hingga impor kosmetik yang melanggar aturan. Penertiban juga dilakukan melalui unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia terhadap fasilitas produksi dan sarana retail.

Selain melakukan penarikan produk dari peredaran, BPOM turut menelusuri rantai distribusi guna mencegah produk serupa kembali masuk ke pasar. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mempersempit ruang gerak

peredaran kosmetik ilegal yang masih marak ditemukan. Secara hukum, peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya melanggar Pasal 435 ayat (1) juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam aturan itu disebutkan bahwa pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar.

Kasus temuan kosmetik berbahaya sebenarnya bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, BPOM berkali-kali menemukan produk pemutih kulit ilegal yang mengandung merkuri dan hidrokinon. Pada 2024 misalnya, BPOM juga mengungkap puluhan produk kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi mencapai miliaran rupiah yang sebagian besar dipasarkan secara daring melalui media sosial dan platform e-commerce.

Fenomena penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik juga menjadi perhatian global. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization pernah memperingatkan tingginya risiko kesehatan akibat penggunaan merkuri dalam produk pemutih kulit, terutama di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika.

Secara internasional, sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa telah melarang penggunaan merkuri dalam kosmetik sejak lama karena terbukti berdampak buruk bagi sistem saraf, ginjal, serta perkembangan janin. Konvensi Minamata yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mendorong penghapusan penggunaan merkuri pada berbagai produk konsumen, termasuk kosmetik.

Di Indonesia sendiri, tingginya permintaan terhadap produk pemutih instan disebut menjadi salah satu faktor maraknya peredaran kosmetik ilegal. Produk dengan klaim hasil cepat kerap diminati konsumen meskipun tidak memiliki izin edar resmi.

BPOM mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur iklan kosmetik dengan janji hasil instan tanpa memperhatikan aspek keamanan. Konsumen diminta selalu memeriksa nomor izin edar dan memastikan produk dibeli dari jalur distribusi resmi.

Meningkatnya temuan ini menjadi sinyal bahwa kewaspadaan tidak boleh diturunkan. Masyarakat harus lebih kritis dalam memilih kosmetik dan memastikan produk yang digunakan memiliki izin edar resmi," ujar Taruna Ikrar.

Indonesia Percepat Eliminasi Malaria Nasional demi Target Bebas 2030

JAKARTA, BP- Pemerintah mempercepat langkah eliminasi malaria nasional dengan memperkuat pengendalian kasus di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, demi mencapai target Indonesia bebas malaria pada 2030. Meski sebanyak 80 persen kabupaten/kota telah dinyatakan bebas malaria, peningkatan kasus dalam dua tahun terakhir menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, mengatakan tantangan eliminasi malaria saat ini terletak pada tingginya penularan di kawasan Papua yang masih mendominasi kasus nasional.

"Secara kewilayahan, dari seluruh kasus malaria di Indonesia, 95 persen berasal dari kawasan Papua yang mencakup enam provinsi. Ini menjadi atensi kita bersama untuk bisa segera diwujudkan eliminasinya," ujar Andi dalam keterangannya di Jakarta saat peringatan Hari Malaria Sedunia 2026, Kamis (30/4).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus malaria sepanjang 2025 mencapai 706.297 kasus atau meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 543.965 kasus. Dari angka tersebut, sekitar 674.046 kasus ditemukan di wilayah Papua.

Kementerian Kesehatan menilai kenaikan kasus bukan sepenuhnya kegagalan pengendalian penyakit. Pemerintah justru melihat peningkatan itu dipicu oleh semakin masifnya penemuan kasus secara aktif di lapangan dan penguatan laporan digital melalui Sistem Informasi Surveilans Malaria (SIS-MAL).

"Peningkatan angka kasus terjadi karena penemuan kasus semakin aktif dan sistem pelaporan kini lebih baik. Ini justru membantu pemerintah memetakan wilayah penularan secara lebih akurat," kata Andi.

Di tengah mening-

katnya kasus, Indonesia tetap mencatat capaian penting dalam program eliminasi malaria. Hingga 2026, sebanyak 412 dari 514 kabupaten/kota telah berhasil memperoleh status bebas malaria. Selain itu, tujuh provinsi juga telah dinyatakan bebas penularan malaria, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.

Keberhasilan tersebut dinilai menjadi modal penting menuju target nasional bebas malaria pada 2030 yang sejalan dengan agenda Tugu Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Secara historis, Indonesia telah menjalankan program pemberantasan malaria sejak era 1950-an melalui penyemprotan insektisida dan pengendalian sarang nyamuk. Pada awal 2000-an, angka kesakitan malaria nasional masih berada di atas 20 kasus per 1.000 penduduk di sejumlah daerah endemis. Namun, dalam dua dekade terakhir, tren kasus berhasil ditekan melalui penguatan layanan kesehatan primer dan distribusi obat antimalaria.

Di tingkat global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat malaria masih menjadi salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia. Laporan World Malaria Report 2025 menyebutkan terdapat sekitar 263 juta kasus malaria secara global dengan lebih dari 597 ribu kematian, mayoritas terjadi di kawasan Afrika Sub-Sahara. WHO juga menargetkan eliminasi malaria di banyak negara pada 2030 sebagai bagian dari agenda kesehatan dunia.

Andi mengatakan pengalaman sejumlah daerah di Indonesia membuktikan eliminasi malaria bukan sesuatu yang mustahil. Ia mencontohkan Kabupaten Maybrat di Papua Barat Daya yang berhasil memperoleh status bebas malaria meski merupakan daerah otonom baru.

"Maybrat menjadi contoh bahwa daerah di Papua juga mampu mencapai eliminasi malaria

jika strategi pengendalian dilakukan secara konsisten dan melibatkan masyarakat," ujarnya.

Untuk mempercepat penurunan kasus di daerah endemis tinggi, pemerintah menerapkan strategi TOKEN atau Temukan, Obati, dan Kendalikan Vektor. Strategi tersebut dilakukan melalui pemeriksaan aktif, pengobatan cepat terhadap pasien positif, serta pengendalian populasi nyamuk Anopheles sebagai penyebab utama penularan malaria.

Intervensi juga difokuskan kepada kelompok masyarakat dengan mobilitas tinggi seperti pekerja tambang, perambah hutan, anggota TNI dan Polri, serta masyarakat adat di wilayah terpencil. Pemerintah mendistribusikan kelambu antinyamuk dan pengobatan pencegahan secara berkala untuk menekan risiko penularan.

Selain faktor kesehatan, pemerintah menilai persoalan lingkungan turut memengaruhi penyebaran malaria. Banyaknya tambang terbungkalai, rawa-rawa, dan kawasan genangan air di daerah tropis menjadi habitat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk Anopheles.

Karena itu, Kementerian Kesehatan mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat pengendalian lingkungan serta menjaga keberlanjutan status bebas malaria.

"Bagi daerah yang sudah bebas, perjuangannya belum selesai. Mempertahankan status tersebut tidak kalah beratnya karena ada daerah yang kembali mengalami lonjakan kasus bahkan sampai KLB setelah sebelumnya dinyatakan bebas," tegas Andi.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil menghentikan penularan malaria, Menteri Kesehatan dijadwalkan menyerahkan Sertifikat Eliminasi Malaria kepada para bupati dan wali kota yang dinilai sukses menjaga wilayahnya tetap bebas malaria sepanjang tahun lalu. (*)

<p>PT FAREN GRAFIKA</p> <p>Harian Pagi</p> <p>Baubau Post</p> <p>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruaoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p>	<p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasctio Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman</p>	<p>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin</p>	<p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</p>	<p>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p>
<p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p>				

Sindiket Judol Asia Tenggara Digerebek, Polisi Periksa Pemilik Gedung



Polisi bakal memeriksa pemilik gedung yang disewa menjadi kantor operasional sindikat judi online transnasional di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP - Kepolisian Republik Indonesia terus memperluas penyelidikan kasus judi online transnasional yang beroperasi di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Setelah menangkap ratusan warga negara asing dalam penggerebekan besar, penyidik kini mengarahkan pemeriksaan kepada pemilik gedung yang digunakan sebagai pusat operasional sindikat tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Wira Satya Triputra mengatakan pihaknya tidak hanya fokus kepada para operator judi online, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga menyediakan fasilitas dan sarana pendukung kegiatan ilegal itu.

"Kita tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap pemilik gedung, termasuk siapa yang menyewa, sampai dengan nanti yang menyediakan peralatan untuk aktivitas perjudian yang ada di lokasi," ujar Wira dalam konferensi pers di lokasi penggerebekan, Minggu (9/5).

Pengungkapan kasus itu bermula dari penyelidikan aparat terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk. Setelah dilakukan penggerebekan, polisi menemukan ratusan pekerja asing yang diduga menjalankan

sistem operasional perjudian daring lintas negara.

Sebanyak 321 orang diamankan dalam operasi tersebut. Dari jumlah itu, 275 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka mayoritas merupakan warga negara asing asal Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Thailand.

Menurut Wira, sindikat itu diketahui baru menjalankan operasional di Indonesia selama kurang lebih dua bulan. Meski demikian, gedung yang dipakai sebagai kantor disebut telah disewa untuk jangka waktu satu tahun.

"Tapi ini akan kami pastikan kembali karena si penyewa juga masih akan kami cek nanti identitasnya di manajemen daripada Hayam Wuruk Tower ini," kata Wira.

Dalam penggerebekan tersebut, aparat turut menyita berbagai barang bukti berupa perangkat elektronik dan dokumen perjalanan milik para tersangka. Barang bukti itu antara lain laptop, komputer pribadi, telepon genggam, paspor, hingga sejumlah brankas.

Polisi juga menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian online. Nilainya mencapai sekitar Rp1,9 miliar, ditambah uang Vietnam sebesar 53.820.000 dong dan mata uang dolar Amerika Serikat se-

nilai US\$10.210.

"Uang rupiah ini diperkirakan sekitar 1,9 sekian miliar yang ada. Kemudian pecahan uang Vietnam 53.820.000, kemudian pecahan dolar itu sebanyak 10.210," ujar Wira.

Para tersangka dijerat Pasal 426 dan/atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain, termasuk dugaan pencucian uang dan kejahatan siber lintas negara.

Kasus ini menambah daftar panjang pengungkapan jaringan judi online internasional di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat keamanan mencatat peningkatan aktivitas sindikat perjudian digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan jaringan internet lintas negara.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya menunjukkan nilai transaksi judi online di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024, transaksi terkait judi online disebut mencapai ratusan triliun rupiah dan melibatkan jutaan akun masyarakat.

Fenomena serupa juga terjadi secara global. Kantor PBB untuk Narkoba

dan Kejahatan (UNODC) dalam sejumlah laporannya menyebut kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu pusat perkembangan sindikat judi online dan penipuan digital internasional. Negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos kerap disebut sebagai basis operasi jaringan tersebut sebelum berekspansi ke negara lain, termasuk Indonesia.

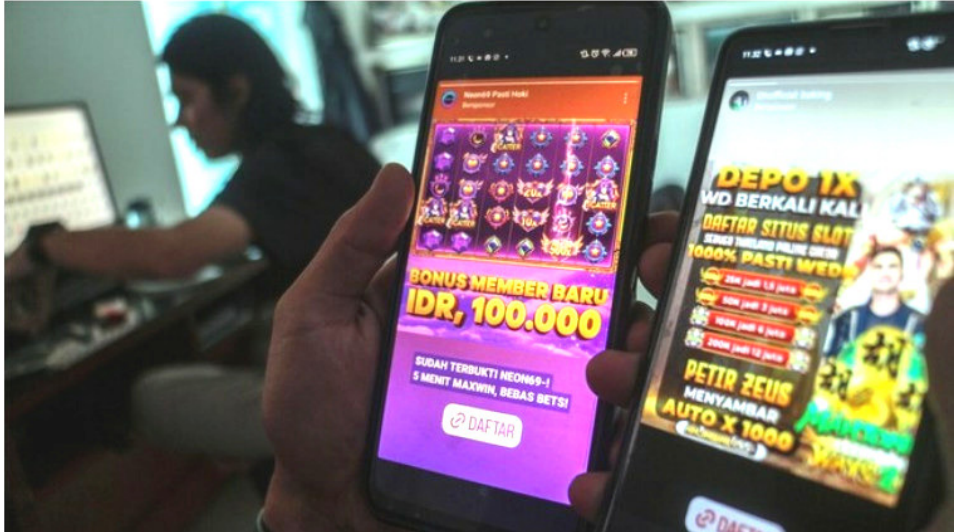
Dalam beberapa kasus internasional, sindikat perjudian online bahkan diketahui menggunakan modus perikutan tenaga kerja asing dan penyewaan gedung perkantoran di pusat kota untuk menyamarkan aktivitas mereka sebagai perusahaan teknologi atau layanan digital.

Polri menegaskan akan terus menelusuri aliran dana, jaringan pelaku, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain yang membantu operasional perjudian daring tersebut di Indonesia.

"Kami akan mendalami seluruh pihak yang terkait, baik penyedia tempat, penyedia perangkat, maupun pihak yang terhubung dengan jaringan internasional ini," kata Wira.

Pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya aparat dalam memperkuat pemberantasan kejahatan siber dan perjudian online yang dinilai semakin mengkhawatirkan di Indonesia. (*)

Polri Ungkap Indonesia Jadi Target Baru Sindikat Judol Asia Tenggara



Laporan: Amran

JAKARTA, BP - Kepolisian Republik Indonesia mengungkapkan adanya pergeseran aktivitas sindikat kejahatan siber internasional ke Indonesia setelah sejumlah negara di Asia Tenggara memperketat penindakan terhadap praktik judi online, penipuan digital, hingga investasi bodong. Fenomena tersebut dinilai menjadi ancaman serius yang perlu diantisipasi bersama oleh aparat keamanan dan pemerintah.

Sekretaris NCB Interpol Polri Brigjen Untung Widyatmoko mengatakan, aparat telah memetakan perpindahan jaringan kejahatan online tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Indonesia dinilai mulai dijadikan lokasi baru untuk menjalankan operasi kejahatan digital lintas negara.

"Setelah ditertibkan, mulai terjadi pergeseran ke Indonesia dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi," ujar Untung dalam konferensi pers pengungkapan sindikat judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Kamis (9/5).

Menurut Untung, sebelumnya negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam dikenal sebagai pusat aktivitas sindikat judi online serta penipuan digital yang menasar korban lintas negara. Namun, operasi penegakan hukum yang dilakukan beberapa negara itu membuat jaringan kriminal mulai mencari wilayah baru yang dianggap lebih aman.

Dalam catatan internasional, kawasan Asia Tenggara memang beberapa tahun terakhir menjadi perhatian dunia akibat maraknya industri penipuan online berbasis sindikat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada 2023 pernah menyebut praktik penipuan daring dan

judi ilegal di Asia Tenggara berkembang menjadi industri bernilai miliaran dolar AS.

Aktivitas tersebut tidak hanya melibatkan perjudian daring, tetapi juga perdagangan manusia, pencucian uang, penipuan investasi, hingga love scamming yang dijalankan secara terorganisasi.

Polri mengungkapkan, sejumlah pengungkapan kasus belakangan ini menunjukkan sindikat tersebut mulai beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia. Di antaranya Jakarta, Batam, Surabaya, Yogyakarta, dan Denpasar.

Aparat menemukan sebagian besar pelaku asing masuk ke Indonesia menggunakan izin kunjungan wisata. Mereka kemudian membangun jaringan operasional dengan memanfaatkan relasi sesama pelaku yang sebelumnya telah lebih dulu berada di Indonesia.

"Mereka datang menggunakan izin wisata, selain karena fasilitas bebas visa kunjungan," kata Untung.

Ia menjelaskan, promosi sektor pariwisata yang terus digencarkan pemerintah juga secara tidak langsung dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan digital untuk mempermudah mobilitas lintas negara.

"Itu tidak bisa dipungkiri. Kita butuh adanya kunjungan wisatawan ke Indonesia. Tetapi di sisi lain, memang ini ada seperti dua sisi mata uang," ujarnya.

Fenomena masuknya jaringan kriminal internasional melalui jalur wisata sebenarnya bukan hal baru. Dalam beberapa kasus sebelumnya, aparat Indonesia juga pernah mengungkap keberadaan operator judi online asing di apartemen dan vila yang tersebar di sejumlah kota wisata.

Pada 2022 misalnya, kepolisian mengungkapkan praktik judi online internasional di Batam yang melibatkan warga negara asing dengan target pemain dari berbagai negara Asia. Sementara pada 2024, aparat juga membongkar jaringan penipuan

online berkedok investasi yang beroperasi dari kawasan Bali dan Jakarta.

Secara nasional, pemerintah Indonesia terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya mencatat perputaran dana judi online di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Kementerian Komunikasi dan Digital bersama aparat penegak hukum juga telah memblokir jutaan konten judi online dalam beberapa tahun terakhir. Namun, para pelaku terus bermunculan dengan metode dan teknologi baru.

Untung menegaskan, Polri bersama Interpol dan lembaga internasional lainnya kini memperkuat kerja sama lintas negara untuk mengantisipasi perpindahan basis operasi sindikat ke Indonesia.

"Kami terus melakukan pemetaan dan pengawasan terhadap jaringan yang masuk ke Indonesia," katanya.

Selain memperkuat penegakan hukum, aparat juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan digital yang kini semakin berkembang, mulai dari judi online, investasi palsu, hingga penipuan asmara melalui media sosial.

Pengamat keamanan siber menilai Indonesia menjadi sasaran empuk sindikat internasional karena tingginya jumlah pengguna internet dan transaksi digital. Dengan populasi pengguna internet yang mencapai lebih dari 200 juta orang, Indonesia dianggap sebagai pasar besar bagi operasi kejahatan siber.

Pemerintah diminta tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat regulasi, pengawasan keimigrasian, dan edukasi literasi digital masyarakat guna mencegah Indonesia berkembang menjadi pusat baru kejahatan online di kawasan Asia Tenggara. (*)

Baubau Catat Prestasi dalam Aksi Konvergensi Penurunan Stunting, Wali Kota HYF Terima Penghargaan Peringkat Tiga Tingkat Sultra



Pemerintah Kota Baubau kembali menorehkan capaian di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah meraih penghargaan Terbaik III Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2026

Laporan: Prasatio M

BAUBAU, BP -Pemerintah Kota Baubau kembali menorehkan capaian di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah meraih penghargaan Terbaik III Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kolaka, Selasa (05/05/2026).

Penghargaan itu diserahkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Baubau dalam menjalankan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting secara terukur dan berkelanjutan.

Capaian tersebut menjadi perhatian karena penanganan stunting masih menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong percepatan penurunan prevalensi stunting melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional sempat berada di an-

gka 24,4 persen pada 2021 dan kemudian menurun menjadi 21,5 persen pada 2023. Pemerintah menargetkan angka tersebut terus ditekan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju bonus demografi 2045.

Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menempatkan stunting sebagai salah satu masalah kesehatan serius di berbagai negara berkembang. WHO menilai stunting berdampak terhadap kualitas kesehatan, kemampuan belajar anak, hingga produktivitas ekonomi pada masa depan.

Kepala Baperida Kota Baubau melalui Sekretaris Dinas Baperida, Dian Purnamasari, S.Si., M.Si., menjelaskan penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Baubau merupakan hasil evaluasi kinerja seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara yang dilakukan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara pada Oktober 2025.

"Penghargaan ini merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang dilakukan seluruh daerah di Sulawesi Tenggara," ujar Dian Purnamasari dalam siaran persnya, Rabu (06/05/2026).

Ia menjelaskan,

penilaian dilakukan melalui pemaparan kinerja pemerintah daerah terkait implementasi program penurunan stunting di masing-masing wilayah. Dalam sesi tersebut, Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, tampil memberikan pemaparan mengenai komitmen dan capaian Kota Baubau.

"Wakil Wali Kota m e n y a m p a i k a n langsung berbagai langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Baubau dalam menurunkan angka stunting melalui pendekatan lintas sektor," katanya.

Menurut Dian, delapan aksi konvergensi yang menjadi indikator penilaian meliputi analisis situasi, perencanaan kegiatan, retribusi stunting, penyusunan regulasi dan kebijakan, pembinaan stakeholder, manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting, hingga review kinerja tahunan.

Pemerintah Kota Baubau dinilai mampu memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjalankan program intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Pendekatan tersebut dilakukan mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga pelayanan kesehatan dan masyarakat.

Selain itu, sistem pengelolaan data stunting yang terintegrasi turut menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan Kota Baubau dalam penilaian tingkat provinsi tersebut. Data yang akurat dinilai penting untuk memastikan intervensi program berjalan tepat sasaran.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi demi mewujudkan generasi Baubau yang sehat, cerdas, dan berkualitas," ujar Dian.

Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Kolaka juga menjadi momentum penguatan komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan, termasuk percepatan penurunan stunting yang kini menjadi indikator penting pembangunan manusia.

Keberhasilan Kota Baubau meraih penghargaan tingkat provinsi tersebut diharapkan dapat memperkuat optimisme daerah dalam mendukung target nasional penurunan stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda di masa mendatang. (*)

Implementasi Enam SPM di Baubau Diperkuat Lewat Advokasi Posyandu Modern



Laporan: Andina

BAUBAU, BP - Pemerintah Kota Baubau memperkuat strategi pelayanan dasar masyarakat melalui pelaksanaan Advokasi Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Posyandu dalam penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Zenith Premiere Baubau, Rabu (06/05/2026), itu menjadi langkah konsolidasi lintas sektor guna memastikan layanan dasar masyarakat berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Baubau, Hj Aryati Yusran, yang juga menjabat Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Baubau, menilai penguatan kapasitas pendamping Posyandu menjadi elemen penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Kegiatan ini adalah langkah strategis. Kita ingin tim pendamping mampu mengimplementasikan enam SPM secara efektif, sehingga Posyandu benar-benar menjadi solusi layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat," ujar Hj Aryati Yusran.

Menurut Aryati, Posyandu saat ini tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, melainkan telah berkembang menjadi pusat layanan sosial dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.

Pelaksanaan advokasi dan bimtek tersebut dihadiri sekitar 60 peserta yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, serta kader Posyandu se-Kota Baubau. Kehadiran lintas sektor itu menunjukkan penguatan

layanan dasar membutuhkan kolaborasi antarlembaga.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Djainudin Ishak, menjelaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak merupakan bagian dari upaya menyelaraskan program pelayanan dasar agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Urusan kesehatan dan pelayanan dasar bukan hanya tanggung jawab satu instansi. Semua sektor harus bergerak bersama agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal," kata Djainudin Ishak.

Ia menjelaskan, materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut mencakup transformasi Posyandu dalam regulasi terbaru, integrasi layanan antar-OPD, hingga strategi pendampingan kader di lapangan secara berkelanjutan.

Untuk memperkuat substansi kegiatan, panitia menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kesehatan Kota Baubau. Para peserta dibekali pemahaman mengenai sinkronisasi program pelayanan dasar dalam enam bidang Standar Pelayanan Minimal.

Enam SPM tersebut meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Pemerintah daerah diwajibkan memastikan seluruh pelayanan minimal itu dapat diakses masyarakat secara merata.

Djainudin Ishak menambahkan, pemerintah menargetkan terciptanya tata kelola Posyandu yang lebih mandiri, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan dan desa.

"Melalui kegiatan ini kami berharap koordinasi antar-lembaga semakin kuat sehingga pelayanan dasar mas-

asyarakat dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan," ujarnya.

Secara historis, Posyandu mulai dikembangkan pemerintah Indonesia sejak awal 1980-an sebagai bagian dari strategi nasional peningkatan kesehatan ibu dan anak berbasis pemberdayaan masyarakat. Program itu kemudian menjadi salah satu model pelayanan kesehatan komunitas terbesar di Asia Tenggara karena melibatkan kader masyarakat secara langsung.

Kementerian Kesehatan RI dalam beberapa tahun terakhir juga terus mendorong transformasi Posyandu melalui integrasi layanan primer. Kebijakan tersebut diperkuat dengan upaya percepatan penurunan angka stunting yang menjadi program prioritas nasional sejak 2020.

Berdasarkan data nasional, Indonesia berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi sekitar 21 persen pada 2024. Penurunan itu salah satunya ditopang oleh penguatan layanan kesehatan dasar di tingkat Posyandu dan Puskesmas.

Di tingkat internasional, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menempatkan pelayanan kesehatan berbasis komunitas sebagai strategi penting dalam memperluas akses kesehatan masyarakat. Sejumlah negara berkembang seperti Thailand dan Vietnam juga mengembangkan model pelayanan komunitas serupa untuk memperkuat layanan primer dan menekan angka kematian ibu serta anak.

Bagi Pemerintah Kota Baubau, penguatan Posyandu dinilai menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan pelayanan dasar di masa depan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang cepat serta terintegrasi. (*)